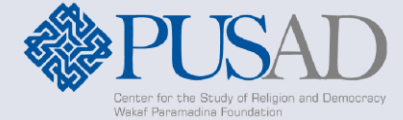




USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



Intoleransi Sosial, Layanan Publik dan Kebebasan Sipil di Indonesia


Presentasi di Indonesia Civil Society Forum, 14 Juni 2023

Ringkasan

Bila anda ingin mengutip sebagian atau keseluruhan dokumen ini, anda wajib mencantumkan informasi ini: USAID MADANI-PUSAD Paramadina. judul kajian. Materi presentasi di ICSF 2023 14 Juni 2023. Jakarta. 2023

Pertanyaan penelitian dan Metodologi

Pertanyaan penelitian:
Bagaimana meningkatnya intoleransi di Indonesia berdampak pada akses terhadap layanan publik dan kebebasan sipil



- **Survei:** representatif secara nasional, 3.880 responden, oversampling di delapan provinsi prioritas USAID
- Enam **studi kasus** untuk lebih memahami dinamika lokal seputar intoleransi, ruang sipil, dan akses universal terhadap layanan.
- **Wawancara informan kunci:** 82 informan: 54 laki-laki dan 28 perempuan; 35 aktivis, 15 pejabat pemerintah, 11 akademisi, dan 21 anggota masyarakat.

Tingkat Toleransi dan Urusan Publik

- Literatur menunjukkan tingkat intoleransi yang tinggi dalam dimensi agama-politik.
- Dikonfirmasi dalam survei kami:
 - 59 persen tidak ingin non-Muslim menjadi kepala daerah di wilayah mayoritas Muslim, dan
 - 50,1 persen berpendapat bahwa non-Muslim tidak boleh menjadi ketua RT/RW di lingkungan mereka
- Namun bagaimana hal ini berdampak ke layanan publik, gambarannya lebih kompleks

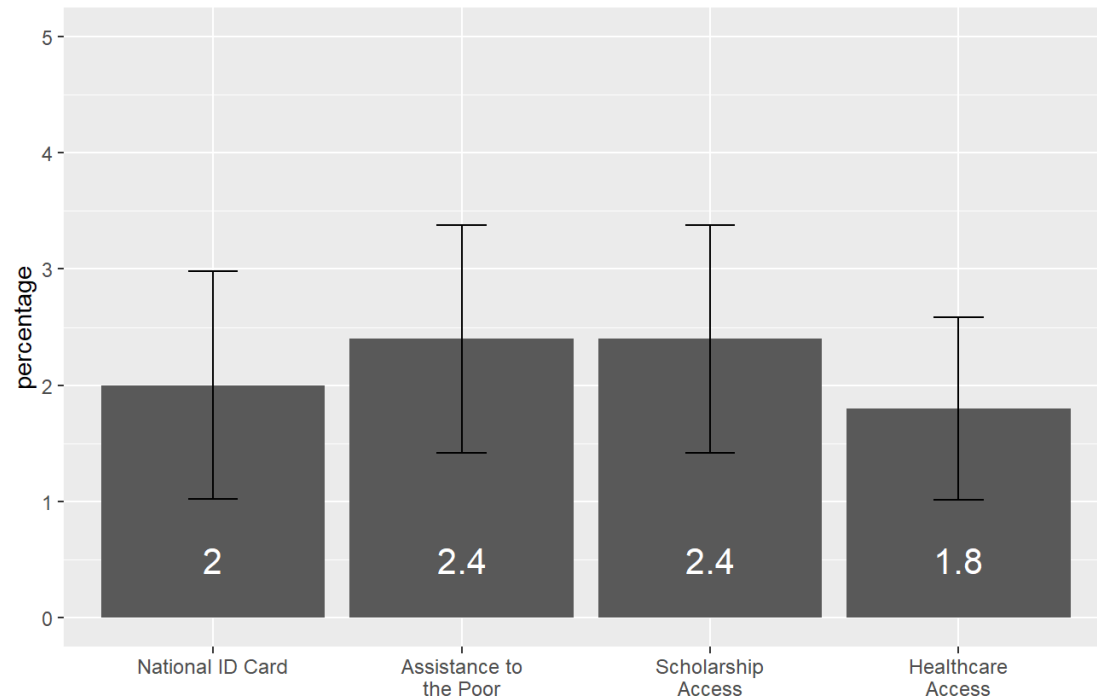
Akses terhadap Layanan

P: Apakah Anda setuju bahwa kelompok agama mayoritas berhak mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik dalam penyediaan layanan publik

- Sebagian kecil responden (3,8%) menginginkan agar kelompok agama mayoritas diprioritaskan dalam mengakses layanan publik
- Hanya sebagian kecil responden Muslim yang setuju bahwa perempuan yang mengenakan jilbab harus mendapat prioritas daripada perempuan yang tidak mengenakan jilbab

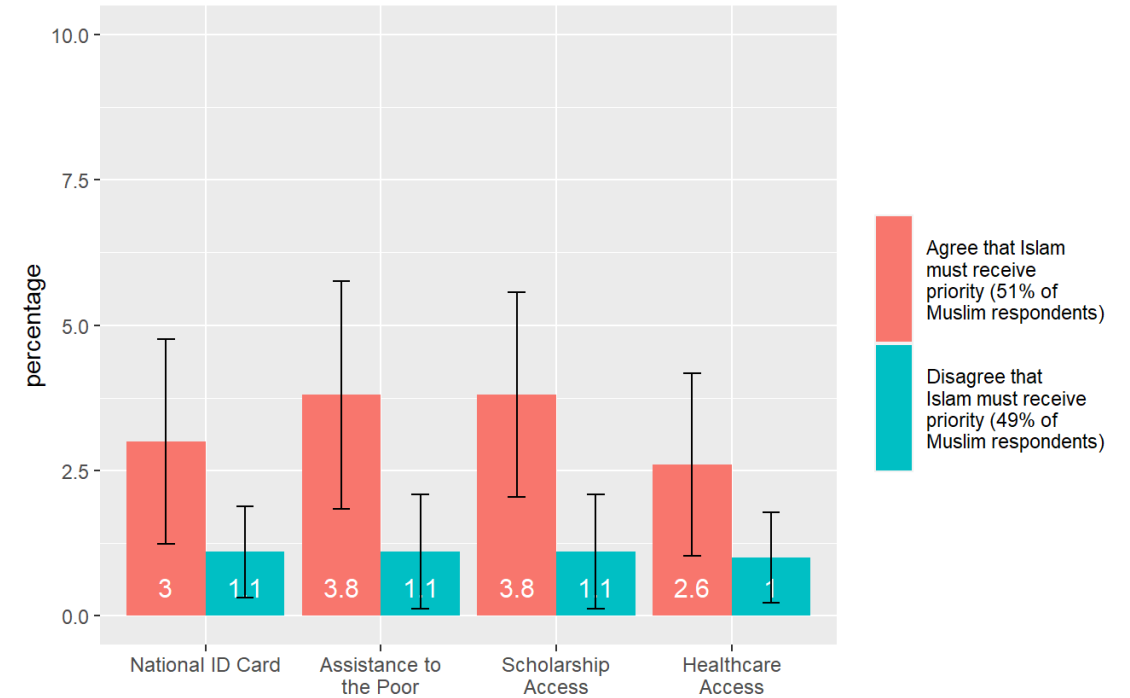
Muslims Should be Prioritized over non-Muslims

% Muslim Respondents Who Agree



Muslims Should be Prioritized over non-Muslims

% Muslim Respondents Who Agree, by Support for Political Islam

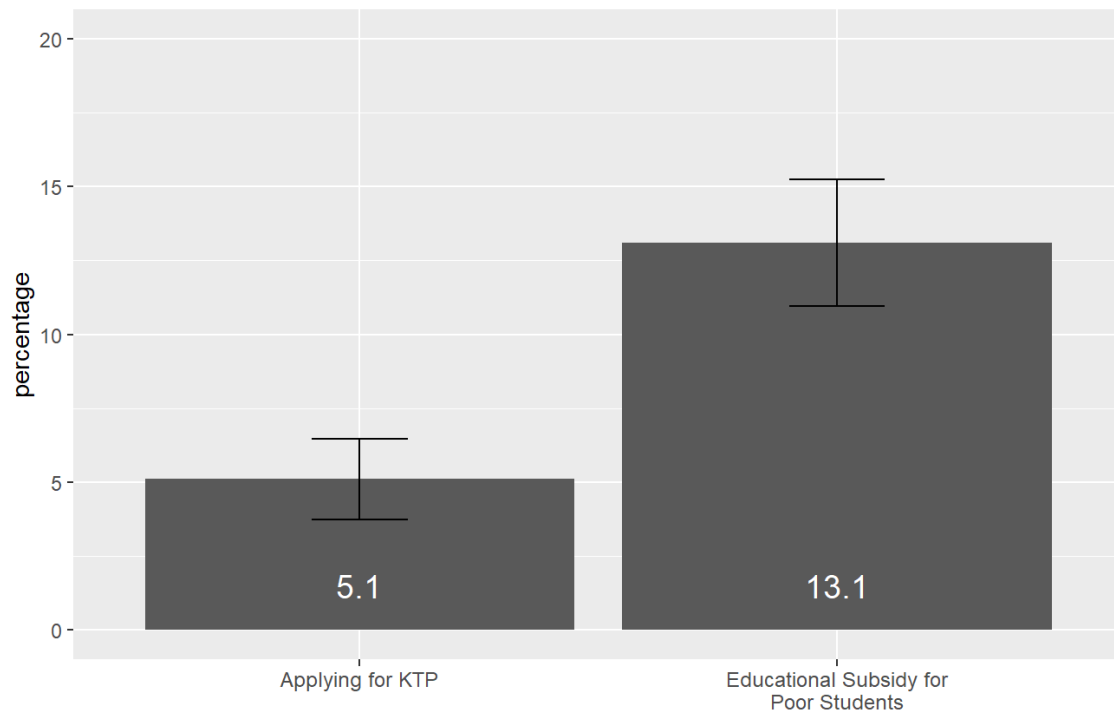


Diskriminasi dalam pelayanan publik

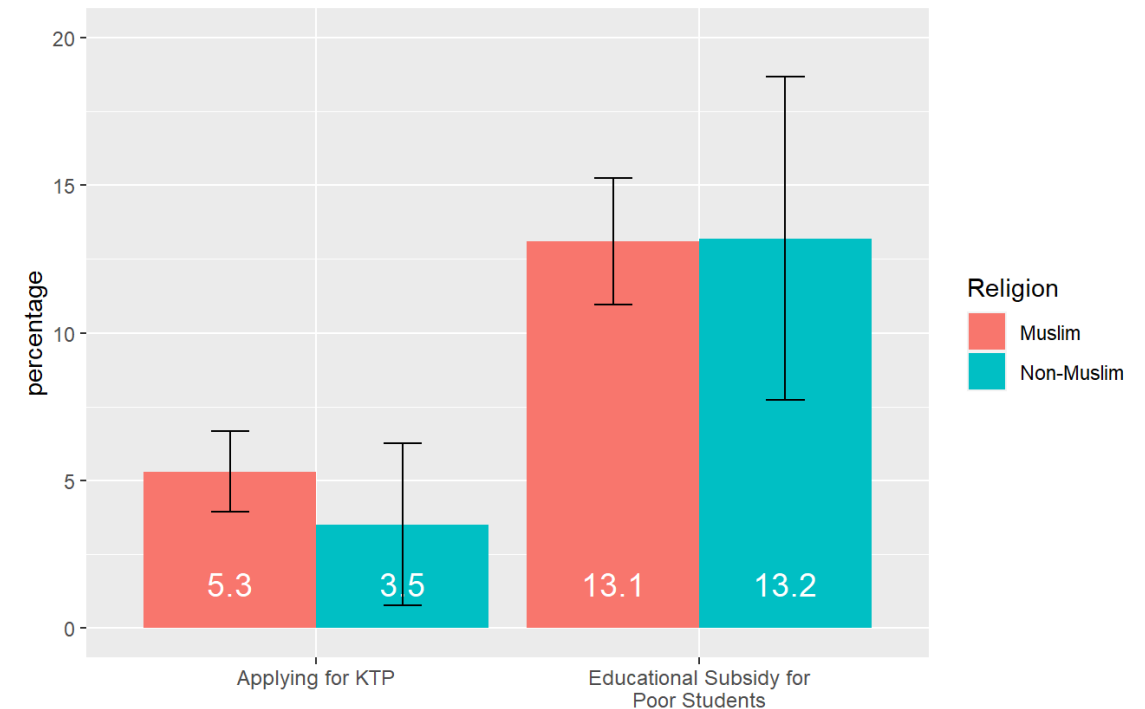
P: Menurut Anda, apakah proses pengurusan KTP dan subsidi pendidikan diskriminatif?

- 5,1% menjawab diskriminasi dalam KTP dan 13,1% dalam subsidi pendidikan
- Semakin tinggi nilai suatu layanan, semakin tinggi risiko diskriminasi

Percentage Perceiving the Service as Discriminative
% All Respondents Who Agree



Percentage Perceiving the Service as Discriminative
% All Respondents Who Agree, by Religion

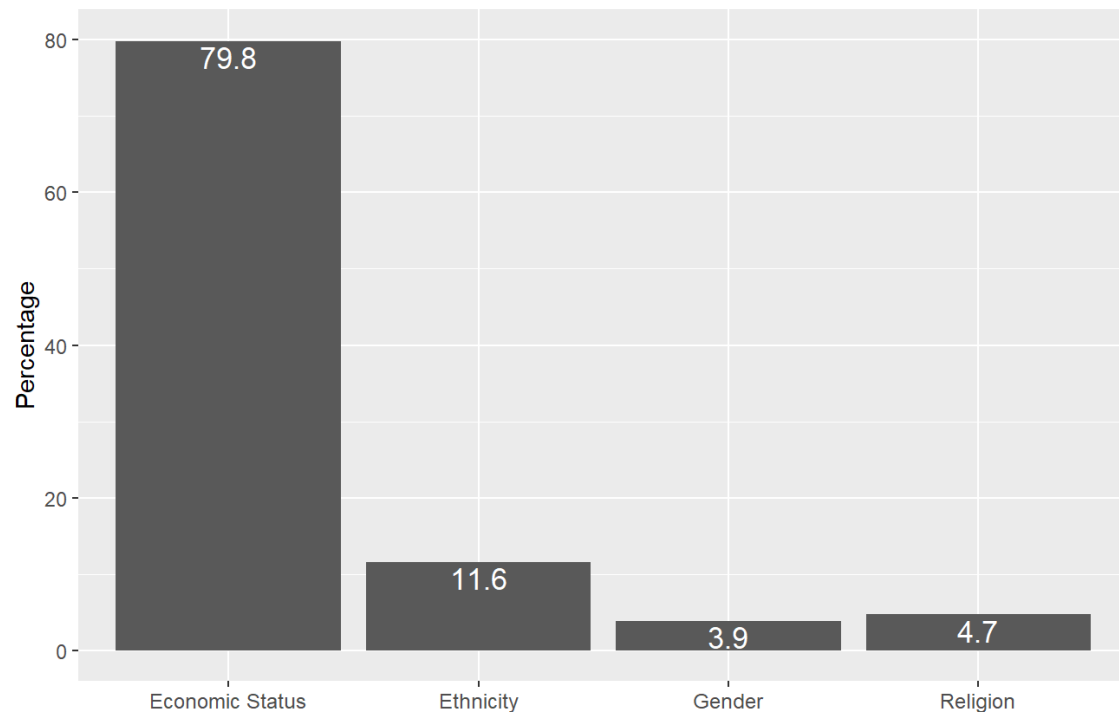


Alasan Diskriminasi

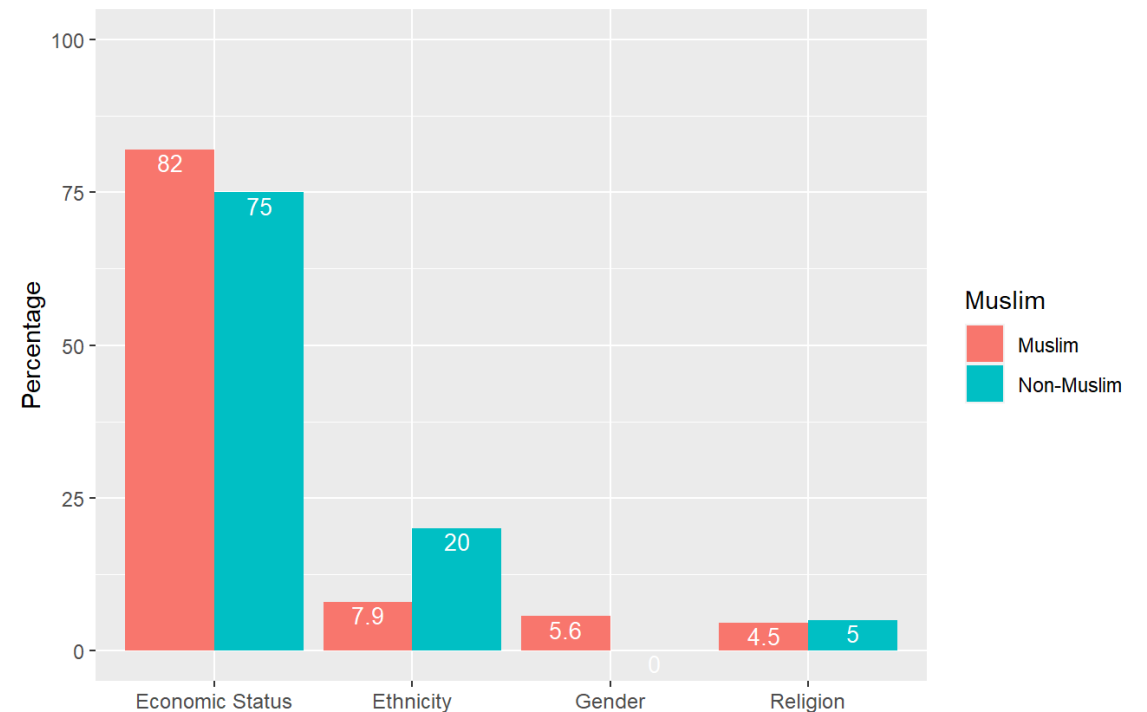
P: Menurut Anda, apa yang mendasari diskriminasi selama proses pembuatan KTP?

- Di antara mereka yang merasakan diskriminasi, baik bagi Muslim maupun non-Muslim, alasan status ekonomi lebih dominan daripada identitas
- Layanan publik dianggap lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki uang atau kontak.

Perceived Reason of Discrimination (National ID Card)
% of All Respondents



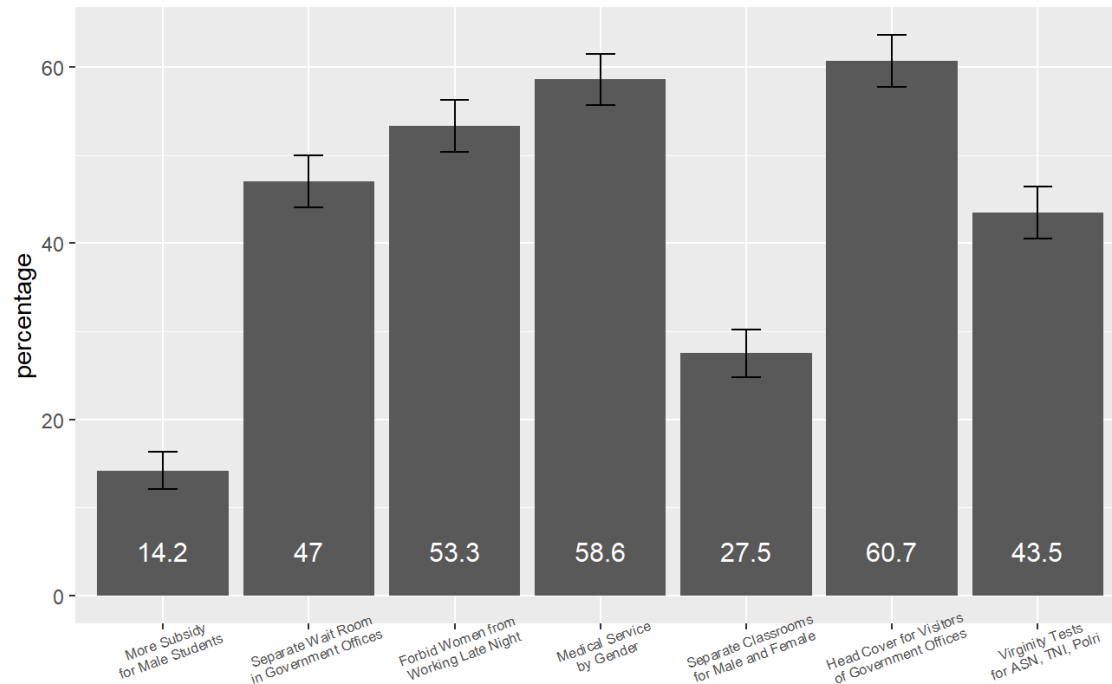
Perceived Reason of Discrimination (National ID Card)
% of All Respondents, by Religion



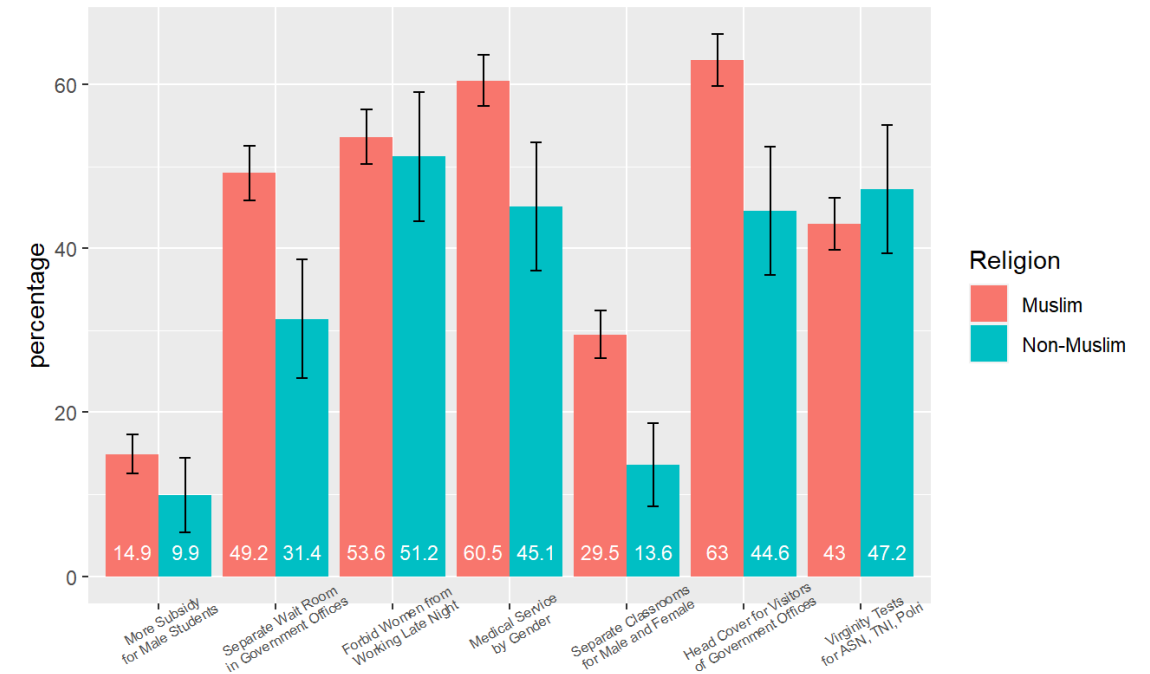
Sikap yang membatasi akses perempuan terhadap layanan publik

- 60,7% responden setuju bahwa perempuan yang mengunjungi kantor pemerintah harus diwajibkan mengenakan jilbab dan berpakaian sopan.
- 53,4% setuju bahwa harus ada aturan yang melarang perempuan bekerja di malam hari
- Responden Muslim cenderung memiliki sikap yang lebih membatasi akses perempuan terhadap layanan publik dan pemerintah daripada responden non-Muslim

Public Service Access by Women
% Respondents Who Agree



Public Service Access by Women
% Respondents Who Agree, by Religion



Faktor yang menjelaskan akses perempuan terhadap layanan publik

Dukungan terhadap Islam politik dan tingkat ketaatan beragama

- Dukungan terhadap Islam politik dikaitkan dengan sikap yang membatasi perempuan dalam mengakses layanan publik.
- Responden yang merasa bahwa layanan publik bersifat diskriminatif cenderung setuju dengan sikap membatasi perempuan dalam mengakses layanan publik.
- Intoleransi dan tingkat ketaatan beragama yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan preferensi untuk memprioritaskan sekte-sekte Islam non-heterodoks daripada kelompok-kelompok yang disebut heterodoks (misalnya, Syiah dan Ahmadiyah) dalam mengakses layanan publik.
- Keyakinan yang lebih kuat terhadap norma dan nilai agama Islam berkorelasi positif dengan preferensi untuk memprioritaskan Muslim daripada non-Muslim dalam mengakses layanan publik.
- Jika kita mengecualikan alasan ekonomi, diskriminasi berbasis gender diterima secara luas oleh sebagian besar responden, terlepas dari agama dan etnis mereka: Seorang perempuan Muslim memiliki risiko diskriminasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki non-Muslim

Studi kasus

1. Dampak Intoleransi terhadap Pembatasan Kebebasan Sipil di Indonesia: Advokasi terhadap UU KUHP
2. Memasukkan Nilai-Nilai Agama dalam Peraturan Daerah dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik: Studi Perbandingan Perda Ketertiban Umum di Kabupaten Cirebon dan Perda Tata Nilai di Kota Tasikmalaya
3. Inisiatif Perlawanan Kelompok Marginal: Studi Kasus Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta
4. Inisiatif Masyarakat Sipil Melawan Intoleransi: Studi Komparatif Peraturan Daerah (Raperda) Toleransi di Kota Pontianak dan Banjarmasin
5. Inisiatif (Mantan) Aktivistis Melawan Intoleransi dalam Sistem Pemerintahan: Studi Kasus UU Kebudayaan
6. Pertarungan hukum dan konstitusional: Dampak Intoleransi terhadap Akses Pelayanan Publik: Studi Kasus Peraturan dan Praktik Diskriminatif Kewajiban Berjilbab di Sekolah-sekolah Negeri di Kota Padang, Sumatera Barat



TERIMA KASIH